

**PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
di Kota Bandar Lampung 2015)**

(Skripsi)

Oleh

REZKI ANANTAMA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung 2015)

Oleh

REZKI ANANTAMA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan, yang berfungsi sebagai pembangunan bagi suatu daerah. Salah satu sumber penerimaan PAD tersebut berasal dari retribusi daerah yang didalamnya terdapat retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kota bandar lampung sebagai salah satu daerah yang mengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini belum maksimal dalam merealisasikan target yang ingin dicapai. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2015 dimana dari target Rp. 6.600.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 5.128.277.000.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan PAD khususnya terhadap retribusi parkir di Kota Bandar Lampung dan mendeskripsikan hambatan-hambatan pengelolaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini ialah: 1. Pada pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan adalah: a. Pada penerapan fungsi perencanaan, pengelolaan yang dilakukan oleh UPT parkir telah terjadi ketidaksesuaian. b. Pada fungsi pengorganisasian terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi ketidaksesuaian antara jumlah yang tertera di struktur dengan kebutuhan. c. Pada fungsi penerapan pengarahan telah berjalan baik. d. Pada fungsi pengawasan belum berjalan optimal secara menyeluruh. 2. Hambatannya sebagai berikut: a. Ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan prosedur. b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia. c. Aparat tidak menjalankan arahan yang diberikan. d. Pengawasan tidak berfokus pada proses secara keseluruhan. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pada pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum: a. Pengelolaan harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. b. Penyesuaian jumlah petugas yang dibutuhkan. c. Pengarahan hendaknya diimbangi dengan pengawasan di lapangan. d. Adanya *punishment* yang tegas. 2. Untuk hambatannya perlu dilakukan: a. Berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan. b. Penambahan jumlah SDM. c. Aparat dilapangan menjalankan arahan-arahan yang diberikan secara baik. d. pengawasan harus berfokus kepada proses pengelolaan secara keseluruhan.

Kata kunci: Manajemen, PAD, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

ABSTRACT

PARKING MANAGEMENT AS AN EFFORT TO INCREASE REGIONAL INCOME (STUDY OF PARKING RETRIBUTION ON PUBLIC ROAD SIDE IN BANDAR LAMPUNG 2015)

By

REZKI ANANTAMA

Regional income is one of the sources of income which serve as a development for an area. One of the sources the regional income comes from local retribution that has parking retribution on public road. Bandar Lampung as one of the regions that manage the parking retribution is not maximally in the realization of the targets to be achieved. It is known from the data in 2015 where the target amount Rp. 6.600.000.000 was only realized about Rp 5.128.277.000.

The purpose of the research is to describe and analyze the management of parking retribution on public road as efforts in increasing regional income especially parking retribution in Bandar Lampung and to describe the obstacles of its management. Type of research is descriptive research with a qualitative approach.

The results of this research: 1. The management of parking retribution on public road is based on principles of management: a. The application of planning, the management which is done by Technical Implementation Unit (UPT) has an inconsistency; b. There was a misuse of authority in organizing and the mismatch between the amount of listed in the structure and needs; c. The application of the instructions has been running well; d. The supervision is not run optimally as a whole. 2. The obstacles showed that: a. The Incompatibility of procedure implementation; b. Lack of human resources; c. The authorities did not carry out the direction given; d. The supervision did not focus on the overall process. For these reasons, it is necessary to do some of the following: 1. In the application of parking retribution on public road: a. The management system should base on applicable rules; b. Adjustment of the number of officers needed; c. The instructions should be balanced with supervision; d. The realization of strict punishment. 2. To reduce the obstacles, it needs to: a. Have a commitment to the implementation of activities; b. Increase the human resources; c. The authorities need to carry out the direction given; d. The supervision must focus on the overall process.

Key Words: Management, Regional Income, Parking Retribution on Public Road

**PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
di Kota Bandar Lampung 2015)**

Oleh

REZKI ANANTAMA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

pada

jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan
Umum di Kota Bandar Lampung)**

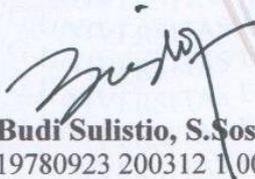
Nama Mahasiswa : **Rezki Anantama**

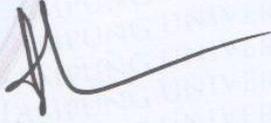
No. Pokok Mahasiswa : 1216041086

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

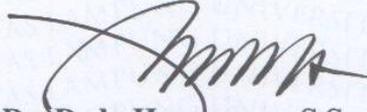
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001


Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.

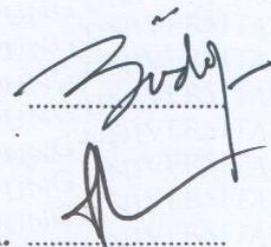
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Bedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

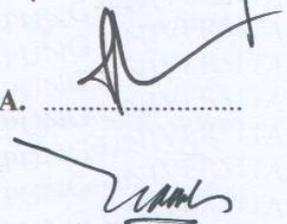
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Sekretaris : **Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.**

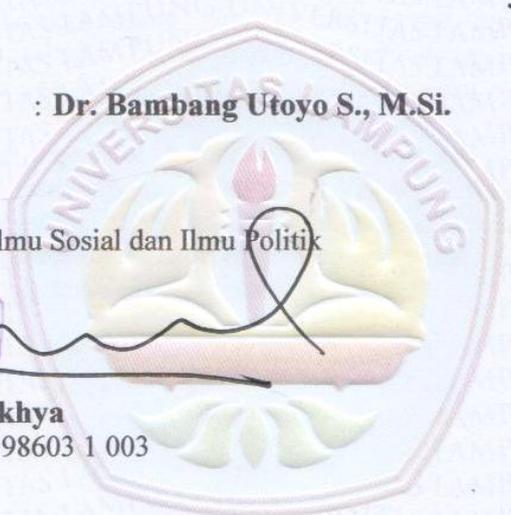


Penguji Utama : **Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 April 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 18 April 2017

Yang membuat pernyataan,



Rezki Anantama
NPM 1216041086

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rezki Anantama, lahir di Panti, Pasaman, Sumatera Barat, pada tanggal 8 November 1993. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muaz dan Ibu Idrawati.

Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak – Kanak (TK) Dharmawanita pada tahun 1998-2000. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SD N 01 Murni Panti pada tahun 2000-2006. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Lubuk Sikaping pada tahun 2006-2009. Setelah itu, pada tahun 2009-2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Lubuk Sikaping.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis diterima melalui Jalur Undangan dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2013 penulis bergabung di sebuah organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) P.A. CAKRAWALA. Setelah itu pada tahun 2014 penulis diberi amanah untuk menjadi KABID Dana dan Usaha dalam struktur organisasi kepengurusan HIMAGARA. Pada tahun yang sama juga penulis ditunjuk untuk menjadi Kepala Divisi DANUS di UKMF P.A. CAKRAWALA. Pada tahun 2015 di pertengahan

bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Jaya Kec. Marga Sari Kab. Tulang Bawang Barat selama 40 hari.

MOTTO

Masadepan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.
(mahatma Gandhi)

*Jangan takut jatuh. Karena yang tidak pernah memanjatlah
yang tidak pernah jatuh.*

*Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal
hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.
(Buya Hamka)*

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita
adalah untuk mencoba, karena di dalam
mencoba itulah kita menemukan dan belajar
membangun kesempatan untuk berhasil.
(Buya Hamka)

Fokus melihat kedepan agar tau arah tujuan, lihatlah kebelakang
untuk mengenang perjuangan.
Menatap keatas untuk menuju puncak yang diinginkan, menoleh ke
bawah agar tau penderitaan yang pernah dirasakan.
(Rezki Anantama)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan Syafaatnya di hari akhir kelak. Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku,

Ayahanda Muaz dan Ibunda Idrawati

yang selalu mencintai, menyayangi dan mengasihi serta mendoakanku dengan tulus sebagai penyemangat hidupku.

*Serta untuk kedua adikku yang ku sayangi **Aldo Maihendra** dan **Muhammad Devri** yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku sehingga karya ini dapat ku selesaikan.*

Almamaterku tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Assalammualaikum Wr Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin tercurah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia- Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung 2015”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Eko Budi Sulistio S.Sos, M.AP selaku pembimbing utama. Terima kasih sudah bersedia memberikan ilmu, saran, waktu, nasehat, dan

bimbingannya dengan sabar sehingga apa yang diberikan dapat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Selvi Diana Meilinda S.A.N, M.P.A. selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas semua hal yang sudah diberikan, baik berupa waktu, ilmu, nasehat. Terimakasih juga buat kesabarannya selama ini dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Bambang Utoyo, M.Si selaku dosen pembahas dan penguji. Terima kasih atas saran, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih untuk waktu, motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dalam mencapai kesuksesan.
6. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih untuk saran, nasihat, motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dalam mencapai kesuksesan.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA Bapak Prof. Dr Yulianto, M.S, Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, Bapak Nana Mulyana, S. Ip, M.Si, Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.SI, Ibu Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si, Ibu Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP, Bapak Fery Triatmojo, S. A.N., M.AP, Ibu Susana Indriyati,

S.IP., M.SI, Ibu Meliayana, S.IP., M.A, Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N. M.A., Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si. dan Bapak Izul Fathu Reza. Terima kasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh di kampus semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.

8. Ibu Nur selaku Staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ramah, dan selalu memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap informan penelitian Bapak Barizi (Sebagai KASUBAG TU UPT Parkir), Ibu Trisih (Selaku Bendahara UPT Parkir), Bapak Suhaili (Selaku Pengelola), petugas parkir dan masyarakat yang telah bersedia untuk di wawancarai terkait penelitian ini. Terima kasih atas waktu, bantuan dan informasi yang telah banyak diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Apa yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi penulis. Semoga semua kebaikan bapak dan ibu sekalian di balas oleh Allah SWT. .
10. Teruntuk kedua orang tuaku bapak Muaz dan ibu Idrawati, terima kasih atas cinta dan sayang yang tak terhingga untuk kalian yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya. Teruntuk papa dan mama sehat selalu ya agar bisa melihat anakmu ini menjadi seseorang yang bisa kalian banggakan dan dapat membahagiakan kalian, amiiiiin.
11. Teruntuk adik-adikku yang kusayangi Aldo dan Devri, tetaplah menjadi adik yang saling support satu sama lain. Semoga kita menjadi saudara yang selalu akur dan kelak dapat membanggakan keluarga besar kita.

12. Buat some one yang dirahasiakan namanya, terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa, perhatian, dan motivasi. Jangan pernah lelah dan bosan untuk menghadapi tingkah orang yang mengesalkan ini.
13. Sabahatku yang suka ngebunglon Alfajar tukang nalar, Mamat kodel, Mbah Satria bos sapi, Tripang bos burung, Topik fotografer, Berry bos Lampung, Ikhwan tukang sepik, Mamak Irlan, Akbar bos bulog, Alga tuan tanah, Bayu bos pupuk, Denis bos baja, Khoi sayang mbak, Kiki underground, Alan tua warnet, Rifki cibi bos hp, Rifki nyum bos guppy, Putu bos obat, Danu ketang. Semoga kita semua menjadi orang sukses, dan jangan pance lagi.
14. Para sahabat wece-wece yuyun, serli, purnama, nisul, vike yang telah memberi warna dibalik canda tawa. Terimakasih juga buat bantuannya.
15. Terima kasih buat teman – teman seperjuangan ANE 2012 (AMPERA) aris, ageng, anisa dubipata, ajeng, ayu septiani, ali firdaus, andre Pratama, guru, ayu tsanita, ayu widya puspita, chairani salamah, dewi, dian, dwini, dianisa, herlina, emi marta, endry ardiyanto, ernawati, fadilla nuari, firdalia, fitri rustiana, ghea, ica yulita, ikhsan, iyaji, siti muslimah, intan, johansyah, kirana, lena, lianse, antonia, si kembar icup dan ipul, maya, mutiara, melisa, eko, nadiril, novaria, novita sari, rischa mollytha, sholeh ridlwan, omega, quqila, rhani umay, ria shellawati, ridha ayu amalia, silvia yolanda, widji ramadhani, yeen gustiance, yoanita. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, canda tawa, dukungan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga pertemanan dan komunikasi kita selalu terjalin, tetap semangat ampere sukses buat kita semua aamiin.
16. Untuk saudaraku angkatan XVI Cakrawala Gaplek bin luwing, Untal bin tengu. Petualangan bermula dari kita dikumpulkan dan ditempa jadi satu,

terimakasih untuk kalian berdua dan semoga kita bertiga tetap jaga persaudaraan ini.

17. Terima kasih untuk Ikatan Keluarga Alumni UKMF P.A. Cakrawala Bang Imam, Bang Yusman, Mba Nila, Bang Mario, Bang BZ, Mami Boy, Bang Juni, Bang Abi, Bang Eka, Bang Ferdy, Bang Eko, Bang Uban, Bang Mimin, Bang Galer, Bang Neo, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya. Terimakasih sudah bersedia memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama ini.
18. Cakrawala Family Enyeng, Curut, Sember, Jambon, Bonceng, Engkes, Balung, Doble, Kacrut, Teteng, Kretek, Galuh, Echy, Gabon, Sowek, Bakicut, Martini, Lonceng, Cipluk, Prenges, Cuping, Nyinyir, Karbon, Bleber, Marjinal, Cumpluk, Tobong, Kutek, Leses, Genyeh, Bontel, Culuk, Kemek, Cenil, Juung, Engap. Tetap jaga harmonisasi kekeluargaan kita, semangat dan mari bangkitkan lagi.
19. Abang dan mbak HIMAGARA yang gak pernah lelah untuk memberi saran, motivasi, pelajaran, pengalaman selama ini, hanya kalimat terimakasih lah yang bisa diungkapkan buat apa yang selama ini kalian berikan kepada penulis.
20. Adik-adik HIMAGARA yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena sanking banyaknya, selama ini kalian telah menyupport dan menemani penulis baik di kampus maupun di luar kampus, tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk berproses di HIMAGARA.
21. Terima kasih untuk temen-temen seperjuangan KKN Galih, Baso, Viyana, Lita, Gesha, Ririn. Makasih untuk waktu 40 hari nya selama KKN. Semoga kita bisa kumpul bareng lagi dan bercanda bareng lagi walaupun sekarang

udah pada sibuk masing-masing tapi selalu penulis doain semoga kita semua sukses dan bisa meraih apa yang udah menjadi cita-cita kita semua. Pokoknya selalu jaga tali silaturahmi kita ya Terima Kasih juga untuk para aparaturnya desa yang telah membantu kami selama berada di lokasi KKN buat pak Budi beserta istri atas bantuan dan nasihatnya juga telah memperbolehkan kami menempati rumahnya dengan Cuma-Cuma. Buat Collin yang sudah dianggap sebagai adik sendiri, cepat gede dan selalu sayang sama bapak dan ibu ya. Untuk semua warga Desa Marga Jaya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT supaya kita bisa bertemu dilain kesempatan.

22. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Lampung
23. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Tidak ada kata yang lebih indah selain kata “terima kasih dan maaf” atas semuanya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung,
Penulis

Rezki Anantama
NPM: 1216041086

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah	9
1. Pengertian Keuangan Daerah	9
2. Sumber-sumber Keuangan Daerah	10
B. Tinjauan Tentang Parkir	13
1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	14
2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	15
C. Tinjauan Manajemen	16
1. Definisi Manajemen.....	16
2. Fungsi Manajemen.....	17
D. Tinjauan Retribusi daerah.....	18
1. Definisi Retribusi Daerah.....	18
2. Objek Retribusi Daerah.....	21
3. Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	30

D. Informan Penelitian.....	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Analisis Data	35
H. Teknik Keabsahan Data.....	37

BAB VI GAMBARAN UMUM

A. Kota Bandar Lampung	41
1. Letak Geografis Kota Bandar Lampung	41
2. Kondisi Perekonomian Kota Bandar Lampung	42
3. Kondisi Lalu Lintas Kota Bandar Lampung	43
4. Jumlah Kendaraan di Kota Bandar Lampung	44
5. Pengelolaan Parkir di Kota Bandar Lampung.....	45
6. Potensi Parkir di Kota Bandar Lampung	46
B. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	46
1. Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	46
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	48
C. Unit Pelaksana Teknis Parkir	50

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
1. Perencanaan (<i>planning</i>).....	52
2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>).....	70
3. Penggerakan (<i>actuating</i>)	78
4. Pengawasan (<i>controlling</i>).....	81
B. Pembahasan.....	86
a. Pengelolaan Parkir	86
1. Perencanaan (<i>planning</i>).....	86
2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>).....	88
3. Penggerakan (<i>actuating</i>)	90
4. Pengawasan (<i>controlling</i>).....	92
b. Kontribusi Pendapatan Parkir Terhadap PAD	94
c. Hambatan Pengelolaan Parkir	95

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	6
2. Daftar Nama Informan	31
3. Daftar Dokumen.....	33
4. Tabel Observasi Penelitian.....	34
5. Contoh Tabel Triangulasi Kriteria Efektivitas.....	39
6. Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua	45
7. Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat	45
8. Target Retribusi Parkir Pertahun.....	46
9. Besaran Retribusi Parkir Zona I	55
10. Besaran Retribusi Parkir Zona II	57
11. Realisasi Retribusi Parkir	62
12. Nama dan Jabatan Struktur UPT Parkir.....	72
13. Rekapitulasi Pencapaian Target 2015	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar teknik analisis data	37
2. Gambar Struktur Dinas Perhubungan	50
3. Gambar Struktur Organisasi UPT Parkir Kota Bandar Lampung.....	51
4. Gambar Proses Penetapan Target Juru Parkir	65
5. Gambar Ilustrasi Penetapan Target Harian di Pasar Way Halim.....	65
6. Gambar Surat Perintah Tugas (SPT)	67
7. Gambar Bagan Struktur UPT Perparkiran	71
8. Gambar Petugas Parkir Tanpa Atribut	77
9. Gambar Rapat Kordinasi	79
10. Gambar Alur Penyerahan Realisasi Target Retribusi Juru Parkir.....	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pembiayaan dalam pelaksanaannya, adapun sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil usaha BUMD dan usaha-usaha lainnya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah.

PAD sebagai salah satu unsur penyusun APBD juga terbagi atas Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah terbagi atas tiga golongan, yakni : 1. Retribusi jasa umum; 2. Retribusi jasa usaha; 3. Retribusi perizinan tertentu (Marihhot P. Siahaan : 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu: a.) Retribusi Pelayanan Umum; b.) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; c.) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; d.) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; e.) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; f.) Retribusi pelayanan pasar; g.) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; h.) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; i.) Retribusi penggantian biaya cetak peta; j.) Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus; k.) Retribusi pengolahan limbah cair; l.) Retribusi pelayanan tera/tera ulang; m.) Retribusi pelayanan pendidikan; n.) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi parkir yang termasuk jenis retribusi jasa umum merupakan jenis retribusi yang ditagihkan pada setiap penempatan parkir sehingga memiliki potensi yang besar dalam rangka menyumbang PAD, pemungutan retribusi parkir

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan sistem pemungutannya di atur pada Pasal 26 dimana pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia sekarang ini ialah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan

undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut, serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi tentang peraturan terkait pajak dan retribusi, sementara pada tingkat lokal diatur oleh masing-masing daerah melalui peraturan daerah masing-masing. Pengaturan pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung berlandaskan pada peraturan daerah pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2011.

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah Kota Bandar Lampung maka pemerintah berhak mengelola salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2011 pada pasal 24 Peraturan Daerah ini menjelaskan bahwa :

“Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa bahwa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung sudah diatur dengan jelas oleh pemerintah kota. Parkir tepi jalan umum yang dikelola oleh UPTD parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ada 600 (enam ratus) titik lahan parkir yang

dibagi dalam 14 zona, masing-masing zona dikelola oleh satu petugas dari Dinas Perhubungan untuk penanggung jawab zona tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 25 Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa “(1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam dua zona; (3) pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah; (4) pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi. Pembagian zona pelayanan parkir tepi jalan umum yang terbagi dalam dua zona yakni berdasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah mencerminkan bahwa pemerintah sebenarnya serius menangani permasalahan parkir tepi jalan umum agar tercapainya ketertiban berlalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Pada dasarnya parkir tepi jalan umum sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Bandar Lampung melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belumlah maksimal karena target tahunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Daerah Kota Bandar

Lampung nyatanya belum tercapai. Hal ini terlihat dari data yang peneliti peroleh dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2014 / 13 juni	Rp 6.000.000.000	Rp 2.870.772.000
2	2015	Rp 6.600.000.000	Rp 5.128.277.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada tahun 2014 dimulai dari tanggal 13 juni, hal ini terjadi karena adanya peralihan penanggung jawab pengelolaan parkir tepi jalan umum dari pihak swasta yakni PT Bina Mitra Persada yang sebelumnya diberi tugas/wewenang sebagai pengelola kepada UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Setelah peralihan yang sudah berjalan sampai sekarang, besaran targetan yang dicanangkan belum terpenuhi ungkapan dari Bapak Barizi selaku Kasubag Tata Usaha UPTD Parkir hal ini dikarenakan masih banyaknya juru parkir liar yang tidak menyetorkan hasil pendapatan parkir kepada pihak pengelola. Oleh sebab itu targetan sektor retribusi parkir belum tercapai hingga tahun 2015.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung 2015)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam upaya peningkatan PAD pada sektor retribusi parkir di Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung dalam peningkatan PAD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan PAD khususnya terhadap retribusi parkir di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam peningkatan PAD di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Administrasi Negara khususnya berkaitan pengelolaan keuangan daerah, utamanya adalah pendapatan asli daerah.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan, khususnya UPT Parkir dalam penyempurnaan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah

1. Pengertian keuangan daerah

Menurut Mardiasmo (2002:9), keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagaimana juga dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu :

- a. Hak Daerah.
- b. Kewajiban Daerah.
- c. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

2. Sumber-sumber keuangan daerah

Dalam hal sumber keuangan yang menjadi hak pemerintah daerah, Djaenuri (2012:88) dalam bukunya mengungkapkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah ini meliputi:

1) Hasil pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2) Hasil retribusi daerah.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian ini dimaksudkan yaitu hasil dari pendapatan dan pengelolaan kekayaan yang ada di daerah selain dari pajak dan retribusi daerah.

Contoh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain: bagian laba; deviden; dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan

contoh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni: jasa giro; sumbangan pihak ketiga; penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; hasil penjualan barang milik daerah; dan lain-lain.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana bagi hasil.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (by origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA).

2) Dana alokasi umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Dana alokasi khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota lainnya, dan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya dana darurat. Untuk keperluan mendesak, kepada daerah tertentu diberikan dana darurat. Keperluan mendesak, maksudnya terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, misalnya terjadinya bencana alam dan/ atau peristiwa lain yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

B. Tinjauan Tentang Parkir

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 31 dan 32, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksudkan dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pasal 47 : Ayat (1). Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Ayat (2), Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah; Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik;
- c. Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan dan melekat dengan usaha pokok;
- d. Penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah.

Pasal 48 : Ayat (1), subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Ayat (2), Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pasal 49 : Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Ayat (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pasal 50 : Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi pelayanan parkir di Kota Bandar Lampung di atur dengan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umu. Beberapa pasal yang menjelaskan mengenai retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: Pasal 24 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Ditepi Jalan Umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 25 yang berbunyi:

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam dua zona. (3) Pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang menggunakan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27 Tingkat Penggunaan Jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan Zona Parkir, Jenis Kendaraan, dan Frekuensi Waktu Pemakaian Tempat Parkir. Pasal 28 yang berbunyi:

- (1) Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir dan/ atau durasi berlangganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Prosedur pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.
- (3) Pilihan atas prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk dipilih.
- (4) Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan memerhatikan prinsip dasar retribusi.

C. Tinjauan manajemen

1. Definisi Manajemen

Definisi manajemen menurut Hasibuan (2009:1) berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Terry dalam Sulistio dan Sulistiowati (2015) Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang ditetapkan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Stoner dalam Sulistio dan Sulistiowati (2015) Manajemen sebagai proses dalam membuat perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*) sebagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

Dari pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para pakar tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu hal yang dilakukan ataupun yang disusun dan berguna dalam melakukan tindakan yang akan dipakai dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan UPT Parkir dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung.

2. Fungsi Manajemen

Terry mendefinisikan manajemen yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2009:38) yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

D. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

1. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut Siahaan (2013), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.
- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI, Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Menurut Darwin (2010:166) jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.

- c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Darwin (2010:167) retribusi daerah dapat 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
 - 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
 - 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:
- 1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
 - 7) Retribusi Penyedotan kakus
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2010) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, atau dokumen pribadi.

Sementara itu Strauss dan Corbin dalam Tresiana (2013) memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain keantifikasian (pengukuran). Penelitian kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan gambar. Penulis akan menggunakan metode ini dengan maksud ingin mendeskripsikan dan

memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang pencapaian target retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung, kontribusi pendapatan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung, dan hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian menjadi suatu menjadi suatu hal yang sangat penting karena fokus penelitian dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Fokus penelitian juga sangat perlu guna untuk membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat mengenai data-data yang akan dikumpulkan dilapangan. Menurut Moleong (2007) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Berdasarkan pemaparan dari Moleong, maka fokus yang digunakan untuk mengukur pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung menggunakan teori fungsi manajemen menurut Terry. Adapun penjelasannya yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Perencanaan

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan mengenai pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah..

2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Pengorganisasian yang dimaksud ialah pembagian kerja yang dilakukan pada UPTD parkir Kota Bandar Lampung sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.
3. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Penggerakan di penelitian ini dimaksudkan berupa penggerakan aparatur yang bertugas sesuai dengan tugas yang sudah diberikan sebelumnya oleh masing-masing unit berdasarkan perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Maksud dari pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas oleh petugas dan pengawasan terhadap retribusi yang telah berhasil dikumpulkan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Menurut Sugiyono dalam sugiyono (2011) *purposive* adalah lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan Menurut Moleong (2007) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan di dalam lingkup wilayah Kota Bandar Lampung yakni khususnya di Dishub Kota Bandar Lampung. Dishub Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena Dishub Kota Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2011) informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat langsung dalam fokus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci atau informan awal dipilih secara *purposive sampling*, sedangkan selanjutnya ditentukan dengan cara *snowball sampling* yaitu dipilih secara bergulir sampai menunjukkan tingkat

kejenuhan informasi. Informan peneliti dalam melakukan wawancara antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Nama Informan

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara	Substansi Wawancara
1.	Barizi, S.E	Kasubag TU UPT Parkir DISHUB Kota Bandar Lampung	29 April 2016, 09 November 2016	Pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung
2.	Suhaili	Aparat pengelola UPT Parkir DISHUB Kota Bandar Lampung	31 Januari 2017	Pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung
3.	Slamet	Petugas Parkir di Pasar Way Halim	23 Desember 2016	Pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung, khususnya penerapan di lapangan
4.	Naufal	Petugas Parkir di Jalan Kartini	30 Januari 2017	Pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung, khususnya penerapan di lapangan
5.	Salikun	Petugas Parkir di Stadion Pahoman	30 Januari 2017	Pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung, khususnya penerapan di lapangan
6.	Khoirul	Masyarakat	31 Januari 2017	Sasaran kebijakan retribusi parkir dan jasa parkir di Kota Bandar Lampung
7.	Samsul	Masyarakat	23 Desember 2016	Sasaran kebijakan retribusi parkir dan jasa parkir di Kota Bandar Lampung
8.	Ony	Masyarakat	23 Desember 2016	Sasaran kebijakan retribusi parkir dan jasa parkir di Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah peneliti 2016

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Menurut Loftland dalam Moleong (2007) sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang semuanya berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian penggerakan, dan pengawasan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung serta pencapaian target retribusi pelayanan parkir, kontribusi pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen- dokumen tertulis yang terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung dimulai dari tahap perencanaan hingga pencapaian target retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung. Data

sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

Tabel 3. Daftar Dokumen

No.	Nama Dokumen
1.	Profil Kota Bandar Lampung,
2.	Profil Dishub Kota Bandar Lampung
3.	Perwali Bandar Lampung No. 83 Tahun 2011
4.	Perwali Kota Bandar Lampung No. 08 Tahun 2008
5.	Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 47 Tahun 2008
6.	Surat Perintah Tugas (SPT)
7.	Data realisasi PAD Dishub Kota Bandar Lampung

Sumber : Diolah Peneliti 2017

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Seperti diungkap Easterberg dalam Sugiyono (2011) wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan kunci. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan alur kebijakan perparkiran tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab antara peneliti dan informan, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa informan seperti Kasubag TU UPT Parkir,

petugas parkir, dan juga masyarakat yang mana sebagai pengguna jasa parkir di Kota Bandar Lampung.

- b) Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2011) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen resmi, *literature* pendukung, dan juga dokumen berupa foto-foto.
- c) Observasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Lapangan, beberapa lokasi berikut ini :

Tabel 4. Tabel Observasi Penelitian

NO.	Nama Lokasi Observasi	Waktu Pelaksanaan
1.	Pasar Way Halim, Kota Bandar Lampung	Tanggal 23 Desember 2016
2.	Jalan Pangkal Pinang, Kota Bandar Lampung	Tanggal 23 Desember 2016

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2017

Pemilihan kedua lokasi observasi tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu : kedua lokasi tersebut adalah merupakan sample dari masing-masing zona lokasi parkir menurut Perwali No. 83 Tahun 2011 (Zona I diwakili Lokasi Pasar Way Halim dan Zona II diwakili Lokasi Parkir Jalan Pangkal Pinang) dan kedua lokasi tersebut merupakan lokasi parkir yang dominan paling ramai dari masing-masing zona.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sementara itu menurut Sugiyono dalam sugiyono (2011) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data (*reduction data*).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi,, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Data yang sudah diperoleh dipilah-pilah dan dirangkum untuk kemudian dicocokkan kembali dengan fokus penelitian ini. Salah satu data yang direduksi adalah dokumen realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015 periode bulan januari sampai dengan desember.

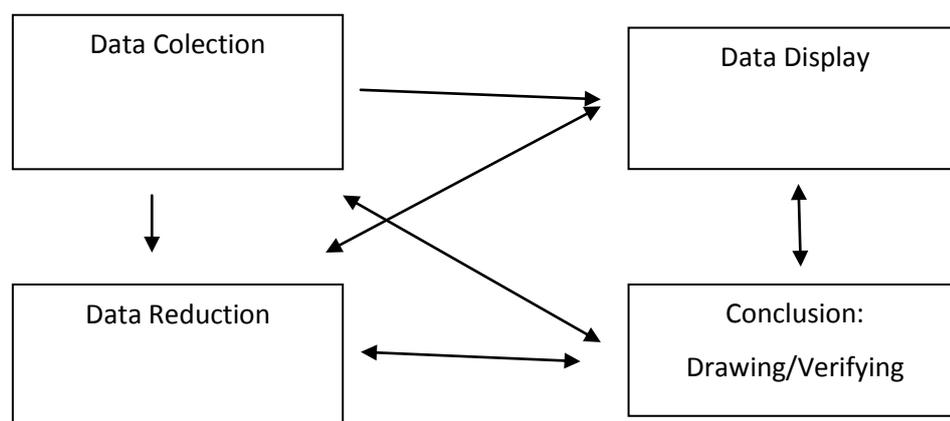
b. Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar. Semua itu dirancang guna mengumpulkan informasi yang tersusun dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki

lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Sumber : Miles dan Huberman dikutip oleh Moleong (2011).

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2007) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam

penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data.

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataannya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

- a. Triangulasi

Menurut Moeleong (2007) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2007) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber.

Tabel 5. Contoh Tabel Triangulasi Kriteria Efektifitas

No.	Informan	Wawancara	Observasi	Dokumen
1.	Barizi, S.E. (Kasubag TU UPT Parkir Kota Bandar Lampung)	Tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp2.500 pada satu jam pertama. Lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp1.500 per jamnya. Jadi nggak boleh menarik retribusi Rp4.000 untuk parkir dua jam. Harusnya hanya dikenakan Rp1.500 setiap melebihi satu jam selanjutnya. Tarif retribusi parkir kendaraan roda dua yang setelah dua jam pertama sebesar Rp1.500, maka kelebihan dikenakan Rp1.000 untuk satu jam pertama	peneliti melakukan observasi ke lapangan dan menemukan bahwa kenyataan di lapangan terkait dengan ketetapan dari tarif parkir tidak dijalankan sebagaimana yang tertera di Peraturan Wali kota Bandar Lampung no. 83 tahun 2011. Dilapangan parkir dipungut hampir merata yakni Rp 2.000 sekali parkir untuk kendaraan roda dua baik itu sebentar maupun lama dalam sekali parkir.	Perwali No. 83 Tahun 2011 dan photo dokumentasi (terlampir pada lampiran)

Sumber: Diolah Peneliti 2017

b. Teknik Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala pertanggungjawaban berdasarkan kejadian-kejadian nyata.

c. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

d. Kepastian data

Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Hal yang dilakukan dalam menguji kepastian data yakni dengan mengadakannya seminar dengan mengundang dosen pembimbing, dosen pembahas, pembahas mahasiswa, dan juga peserta.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Kota Bandar Lampung

1. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

Menurut website resmi milik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung, letak geografis Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

“Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 50 20’ -50 30’ Lintang Selatan dan 1050 28’-1050 37’ Bujur Timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi ke dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km²”.(Sumber:http://www.bandarlampung.bpk.go.id/?page_id=2625 diakses pada tanggal 24 Januari 2017).

Kota Bandar Lampung adalah ibukota dari Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil simposium Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.

Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kondisi Perekonomian Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah ibu kota dari provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung, letak kotapun sangat strategis karena merupakan daerah transit antar pulau sumatra dan jawa yang begitu memberi keuntungan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung memanfaatkan letaknya yang secara strategis sebagai pengembangan perekonomian dengan memberikan peluang kepada investor untuk menanam modal di Bandar Lampung, serta meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerahnya.

Kondisi perekonomian pada saat ini dalam kondisi maju. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial yang

memiliki perkembangan/peningkatan yang pesat dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Hal tersebut jelas dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, maka akan semakin mempengaruhi tingkat PAD Kota Bandar Lampung. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yang menyatakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung menurut lapangan usaha atas dasar harga konsisten tahun 2010-2014 mengalami peningkatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, jumlah penduduk di kota Bandar Lampung pada sensus 2010 sebanyak 881.801 orang, dan dengan jumlah penduduk umur produktif, umur 15 tahun keatas sebanyak 660.021 , dengan angka PDRB yang dihasilkan pada tahun 2012 sebesar 25,53 triliun angka ini terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sektor industri pengolahan tanpa migas, yaitu sebesar 21, 89 persen.

3. Kondisi Lalu Lintas Kota Bandar Lampung

Dewasa ini keadaan lalu lintas di Bandar Lampung mengalami kemacetan di beberapa lokasi atau jalan. Hal tersebut berdasarkan publikasi kondisi kemacetan di Bandar Lampung pada media massa *online* “*kabar24bisnis.com*”, yang menyebutkan bahwa :

“Keluhan serupa diungkapkan beberapa warga pengguna sepeda motor maupun mobil pribadi di Bandar Lampung. Mereka menyebutkan, kawasan yang selalu mengalami kemacetan, seperti ujung Jalan A Yani menuju Jalan Kartini depan SPBU dan salah satu pusat belanja modern setempat, sekitar Jalan Teuku Umar di depan RSUD Abdul Moeloek dan Markas Korem 043 Garuda Hitam maupun menuju Jl Zainal Abidin Pagaralam di depan kawasan pendidikan dan Kampus Universitas Lampung. Kemacetan juga kerap terjadi di depan Mal Bumi Kedaton

simpang Way Halim hingga ke dekat PKOR Way Halim, persimpangan kereta api Jalan Urip Sumoharjo hingga perempatan Way Halim, depan Pasar Tugu, dan sejumlah ruas jalan lainnya di Bandar Lampung. Warga berharap rekayasa lalu lintas dan terobosan lain untuk mengatasi kemacetan di Bandar Lampung yang diupayakan Pemkot Bandar Lampung terus dilengkapi dan disempurnakan hingga mampu mengatasi kemacetan itu.”(Sumber:<http://kabar24.bisnis.com/read/20160327/78/531654/kemacetan-kota-bandarlampung-makin-parah> diakses pada tanggal 24 Januari 2017).

Berdasarkan berita di atas dapat dicermati bahwa terdapat beberapa titik kemacetan di Kota Bandar Lampung, kondisi kemacetan tersebut terjadi pada :

- a. Jalan Ahmad Yani – Jalan Kartini
- b. Sekitar Jalan Teuku Umar
- c. *Mall* Boemi Kedaton – PKOR Way Halim
- d. Persimpangan Jalan Kereta di Jalan Urip Sumoharjo – Simpang Empat Jalan Way Halim
- e. Depan Pasar Tugu

Hal tersebut menandakan bahwa lonjakan pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pengembangan jalan yang ada di Kota Bandar Lampung ini, yang berdampak terhadap timbulnya kemacetan di beberapa titik jalan.

4. Jumlah Kendaraan Di Kota Bandar Lampung

Jumlah Kendaraan di Kota Bandar Lampung relatif berjumlah sangat banyak, menurut Satuan Lalulintas (Satlantas) Kota Bandar Lampung jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bandar Lampung 2010-2015 (dalam unit)

No.	Tahun	Kendaraan Roda Dua	Trend
1.	2010	32.335	-
2.	2011	42.724	32,12 %
3.	2012	45.152	5,68 %
4.	2013	47.487	5,17 %
5.	2014	48.539	2,21 %
Jumlah		216.237	45,18 %

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung 2015

Sedangkan jumlah kendaraan bermotor roda empat menurut Satuan Lalulintas Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Bandar Lampung 2010-2015 (dalam unit)

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan	Trend
1.	2010	6.895	-
2.	2011	7.602	10,25 %
3.	2012	5.032	-33,80 %
4.	2013	5.471	8,72 %
5.	2014	5.521	0,91 %
Jumlah		30.521	-13,92 %

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung 2015

5. Pengelolaan Parkir Di Kota Bandar Lampung

Pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dishub Kota Bandar Lampung, yang pelaksana hariannya diserahkan UPT Parkir. Untuk melaksanakan pengelolaan parkir pada lapangan, dibentuk 14 (empat belas) aparat yang bertugas sebagai pengelola dan dibantu petugas parkir. Petugas parkir di tempatkan di titik-titik parkir.

Menurut Perwali No. 83 Tahun 2011, titik-titik parkir di Kota Bandar Lampung terbagi atas 2 (dua) zona, yaitu Zona I (terbagi 14 lokasi) dan Zona II (terbagi 79 lokasi).

6. Potensi Parkir Di Kota Bandar Lampung

Terkait potensi parkir di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari target yang dibebankan kepada UPT Parkir. Target UPT Parkir di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7 Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung

No.	Tahun	Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Rp)	Trend
1.	2011	4.000.000.000	-
2.	2012	5.400.000.000	35 %
3.	2013	6.000.000.000	11,11 %
4.	2014	6.600.000.000	10 %
5.	2015	6.600.000.000	0 %
Jumlah			56,11 %

Sumber : Dishub Kota Bandar Lampung 2015

B. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

1. Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi :

“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal”

Misi :

- a. Terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.
- b. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman.
- c. Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Sasaran :

- a. Mengendalikan kemacetan lalu lintas
- b. Meningkatnya pengguna jasa angkutan umum yang aman dan nyaman
- c. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan.

Strategi :

- a. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi prasarana perhubungan seperti *traffic light* Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terkoneksi dengan pusat kendali *Area Traffic Control System* (ATCS), rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar serta melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas (PAMTUR LALIN) dengan menempatkan petugas pelaksana PAMTUR selain pada lokasi rawan macet.
- b. Mengoperasikan angkutan umum masal yang aman, nyaman dan relatif terjangkau, dapat menarik kembali pengguna transportasi umum yang sempat beralih kembali ke kendaraan pribadi (khususnya sepeda motor) dengan mengoperasikan sarana angkutan umum masal (BRT) Trans Bandar Lampung. Selain kenyamanan, faktor keselamatan berperan penting dalam berkendara maka kelaikan kendaraan perlu ditingkatkan dengan melengkapi peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- c. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan umum untuk lebih tertib dalam menunggu angkutan umum. Selain itu keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang/ pengguna jasa angkutan

umum diterapkan dengan meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa angkutan umum.

Kebijakan :

- 1) Manajemen Lalu Lintas
- 2) Manajemen Angkutan Umum
- 3) Manajemen Angkutan Barang
- 4) Manajemen Terminal
- 5) Manajemen Tata Ruang
- 6) Manajemen Lingkungan
- 7) Manajemen Sumber Daya Manusia

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

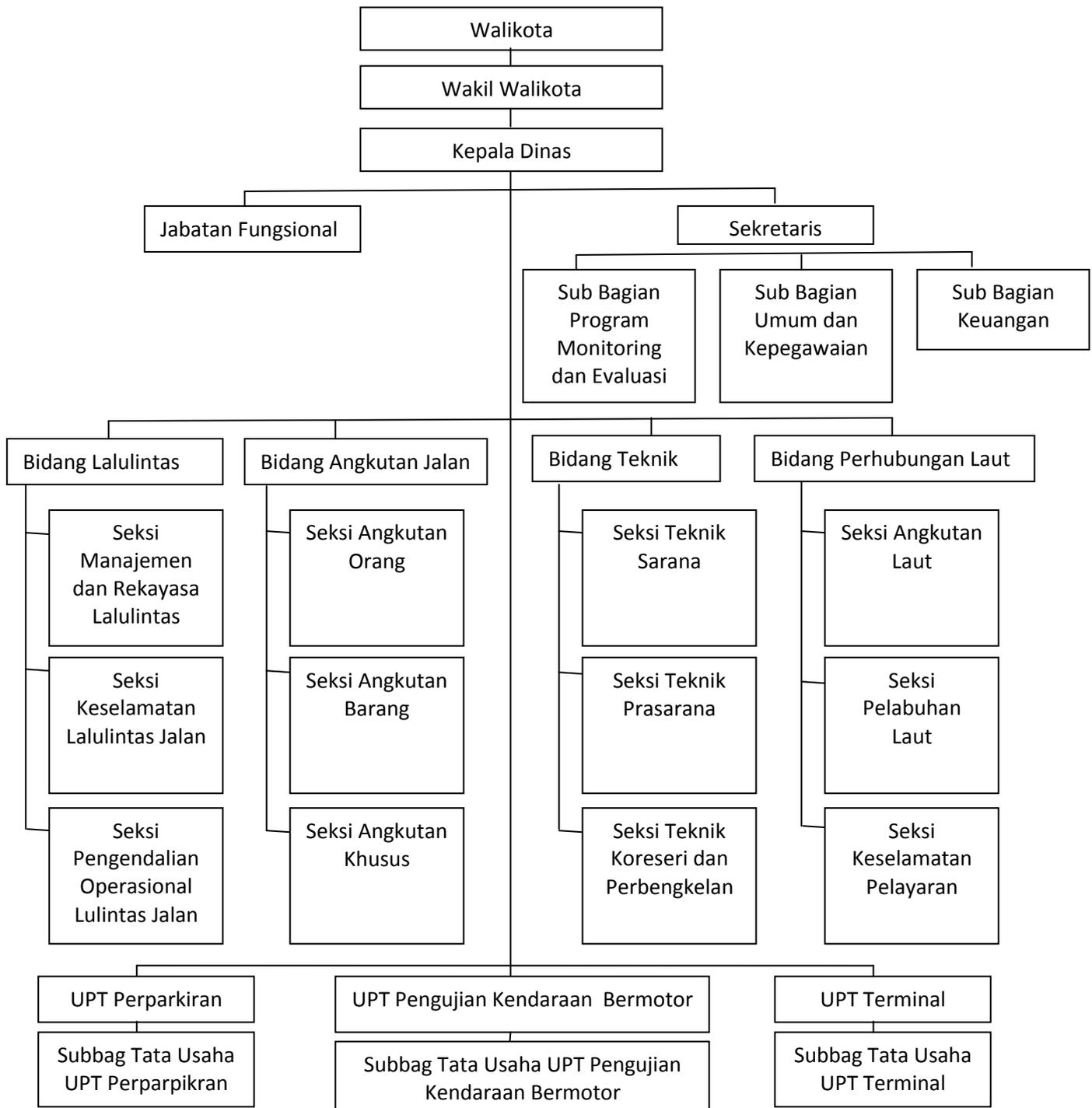
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Institusi pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 08 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah Unsur Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Adapun contoh bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan

Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

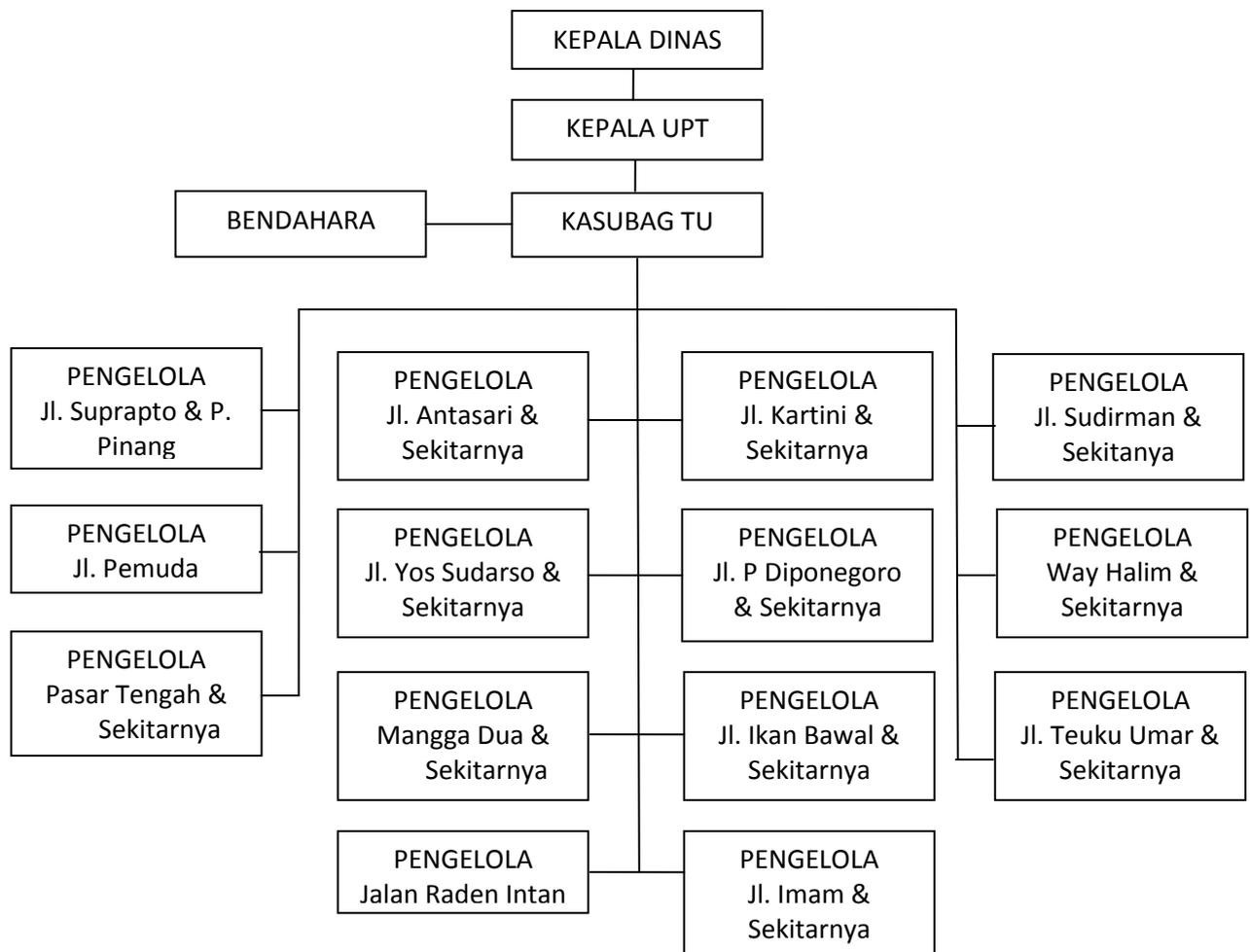
C. Unit Pelaksana Teknis Parkir

Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Bandar Lampung tertuang dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung No 33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. UPTD perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang Perparkiran. Dalam melaksanakan tugas pokok UPTD Parkir mempunyai fungsi :

1. Perencanaan teknis operasional
2. Pelaksanaan teknis operasional
3. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional;

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 33 Tahun 2001 Tentang Bagan Struktur Organisasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, berikut adalah gambar strukturnya :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERPARKIRAN KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 3 Struktur Organisasi UPT Parkir Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah peneliti 2017

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah peneliti laksanakan terkait pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

A. Kesimpulan

Hasil dari analisa pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung, dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2015

Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pada pengelolaan, dapat di lihat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada penerapan fungsi perencanaan, pengelolaan yang dilakukan oleh UPT Parkir telah terjadi ketidaksesuaian antara Perwali No.83 Tahun 2011 yang menjadi acuan dengan pelaksanaan di lapangan. Adapun realisasi target yang tercapai pada tahun 2015, adalah sebesar Rp. 5.128.277.000,- atau sekitar 77 % dari target awal sebesar Rp. 6.600.000.000,-.
- b. Pada penerapan fungsi pengorganisasian, pengelolaan yang dilakukan oleh UPT Parkir telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi

ketidaksiuaian antara jumlah yang tertera di struktur dengan kebutuhan menurut Perwali No. 83 Tahun 2011, khususnya jumlah aparat petugas pengelola.

- c. Pada penerapan fungsi pengarahan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum yang dilakukan oleh UPT Parkir telah berjalan baik walaupun pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing petugas yang berada di lapangan belum maksimal.
- d. Pada penerapan fungsi pengawasan mengenai pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2015 belum berjalan optimal secara menyeluruh disemua lini

2. Hambatan Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2015

Beberapa hambatan yang terdapat dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Ketidak konsistenan/inkomitmen terhadap pelaksanaan prosedur atau acuan yang ditetapkan (Perwali No. 83 Tahun 2011) dan penetapan target yang belum tepat.
- b. Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bertugas kurang memadai
- c. Aparat tidak terlalu menjalankan arahan-arahan yang diberikan secara baik terkait arahan telah yang.diberikan.
- d. Pengawasan yang dilaksanakan hanya berfokus kepada besaran nilai pencapaian target tetapi tidak berfokus kepada proses-proses secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung tahun 2015 yang peneliti lakukan, peneliti menyarankan dalam beberapa *point* sebagai berikut :

1. Saran Untuk Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pada pengelolaan, beberapa saran yang peneliti sampaikan :

- a. Pada penerapan fungsi perencanaan, pengelolaan harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. UPT Parkir kedepannya harus lebih menekankan kepada para petugas mengenai acuan pengelolaan di lapangan.
- b. Pada penerapan fungsi pengorganisasian, UPT Parkir hendaknya menyesuaikan jumlah petugas yang dibutuhkan. Pengusulan *recruitment* SDM kepada Pemkot Bandar Lampung dapat dilakukan.
- c. Pada penerapan fungsi pengarahan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum yang dilakukan oleh UPT Parkir hendaknya pengarahan yang dilakukan juga diimbangi dengan pengawasan pada lapangan. Sehingga pengarahan yang diberikan berjalan maksimal dalam implementasinya.
- d. Pada penerapan fungsi pengawasan, hendaknya UPT Parkir menjalankan pengawasan dibarengi dengan punishment yang tegas bagi aparat yang tidak sesuai menjalankan tugasnya.

2. Saran Untuk Hambatan Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan beberapa hambatan yang terdapat dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2015, adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap aparat yang berwenang hendaknya lebih berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penentuan target hendaknya benar-benar dikaji berdasarkan mobilitas jumlah kendaraan.
- b. UPT Parkir hendaknya memperbaiki jumlah SDM sehingga lebih memadai.
- c. Aparat semestinya menjalankan arahan-arahan yang diberikan secara baik terkait arahan telah yang.diberikan.
- d. Hendaknya pengawasan yang dilakukan jangan hanya berfokus kepada besaran nilai pencapaian target tetapi juga berfokus kepada proses-proses pengelolaan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
Raja Grafindo. Jakarta.
- Djaenuri, H.M. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia
Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*.
Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
Rosda Karya.
- Sulistio, Eko Budi, dan Rahayu Sulistiowati. 2015. *Azas-azas Manajemen*. Bandar
Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja
Grafindo.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.
- Terry, George. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung:
Universitas Lampung 2013.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 44 tahun 2009 tentang Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak parkir

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah